



ABSTRAKSI

Pemeriksaan kinerja Badan Pemeriksa Keuangan terkait implementasi akuntansi berbasis akrual pada pemerintah daerah menunjukkan berbagai temuan antara lain regulasi dan kebijakan terkait implementasi Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) belum relevan, kebutuhan dan kompetensi SDM belum memadai, aset dan teknologi informasi yang belum memadai, regulasi dan sistem aplikasi yang belum selaras, dan dokumen perencanaan yang belum komprehensif. Berdasarkan temuan tersebut ditengarai implementasi akuntansi berbasis akrual di daerah belum sesuai dengan SAP berbasis akrual pada PP 71/2010. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi penerapan akuntansi berbasis akrual pada lima pemerintah daerah berdasarkan SAP berbasis akrual dengan cara menilai tingkat akrual masing-masing entitas. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara, observasi, dan dokumentasi. Aspek yang diteliti ialah pengakuan transaksi konversi aset menjadi beban, belanja yang belum dibayar, perolehan aset yang belum dibayar, dan pendapatan yang belum diterima kasnya. Keempat aspek tersebut dinilai berdasarkan ketepatan waktu pencatatan pengakuannya. Hasil evaluasi implementasi akuntansi berbasis akrual pada lima pemerintah daerah menunjukkan tingkat akrual yang bervariasi. Peringkat tertinggi dicapai oleh pemerintah Kabupaten Karanganyar dengan tingkat akrual 70 persen, peringkat kedua diperoleh pemerintah Kabupaten Sleman dengan tingkat akrual sebesar 54 persen, peringkat ketiga diperoleh pemerintah Kabupaten Bantul sebesar 52 persen, peringkat keempat diperoleh pemerintah Provinsi DIY sebesar 49 persen, dan peringkat kelima diperoleh pemerintah kota Yogyakarta dengan tingkat akrual sebesar 38 persen.

Kata kunci: evaluasi implementasi akuntansi berbasis akrual, evaluasi akuntansi berbasis akrual, pengakuan, transaksi akrual.



ABSTRACT

Examination of the Supreme Audit Agency regarding the implementation of accrual accounting on the local government showed various findings. Among those findings are regulations and policies related to the implementation of the Government Accounting Standards (SAP) that are not relevant, insufficient competence of human resources, inadequate assets and information technology, regulation and system applications that are not aligned, and uncomprehensive planning document. Based on these findings, it is considered the implementation of accrual accounting in local government are not in accordance with the accrual-based SAP PP 71/2010. This study aimed to evaluate the implementation of accrual accounting in the five local governments based on accrual-based SAP by assessing the accrual rate of each entity. This study uses a qualitative method. The data collection was done by interview, observation and documentation. Aspects studied are activities of converting assets to expense, accruing unpaid expenses, accruing unpaid assets, and accruing uncollected revenue. The four aspects are assessed based on the timeliness of the recording or the recognition. The results of the evaluation of the implementation of accrual accounting in the five local government shows that accrual rate varies. The highest ranking achieved by the government of Karanganyar with accrual rate of 70 percent, ranked second is Sleman district government that obtained by the accrual rate of 54 percent, ranked third is Bantul district government that obtained 52 percent, ranked fourth is Yogyakarta Provincial Government that gained by 49 percent, and Yogyakarta city government earned fifth with accrual rate of 38 percent.

Key words: evaluation the implementation of accrual accounting, evaluation of accrual accounting, recognition, accrual transaction